

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Oposisi Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), berperan sebagai kekuatan penyeimbang. Oposisi mengimbangi pemerintah dengan cara mengkritisi kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, mewadahi aspirasi masyarakat lintas partai, dan memerankan diri sebagai kelas menengah yang menjembatani kepentingan kelas bawah terhadap penguasa. Pelaksanaan oposisi Fraksi PDI Perjuangan tidak terlepas dari fungsi DPR yaitu legislasi, budgeting, dan controlling. Selama masa persidangan IV tahun sidang 2006-2007 Fraksi PDI Perjuangan telah mengkritisi sedikitnya 40 kebijakan pemerintah. Masa persidangan I tahun sidang 2007-2008 (Agustus-Oktober 2007), ada sekitar 36 kebijakan pemerintah yang dikritisi dan masa persidangan II tahun sidang 2007-2008 (Nopember-Desember 2007) tidak kurang dari 34 kebijakan pemerintah dikritisi oleh Fraksi oposisi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan bekerja pada saat pembuatan kebijakan publik serta mengawasi kebijakan tersebut yang bertumpu pada kedaulatan pangan, kedaulatan keuangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan pertahanan.
2. Sikap oposisi yang dijalankan oleh Fraksi PDI Perjuangan merupakan bagian dari pendidikan politik bagi publik, bahwa dalam negara demokrasi keberadaan oposisi adalah sebuah kehalalan politik. Berbagai kalangan terlibat dalam pembelajaran politik oposisi ini, yaitu masyarakat, kader partai, fraksi-

fraksi lain di legislatif, bahkan pemerintah. Bagi para kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif (Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI) sikap politik partainya menuntut mereka untuk lebih berpikir kritis, dan harus memiliki kalkulasi yang rasional. Sedangkan untuk para fraksi lainnya di DPR memberikan pembelajaran politik bahwa dalam politik adanya sebuah perbedaan merupakan kewajaran politik, dan keberadaan oposisi lebih mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dibanding sebelumnya. Bagi masyarakat, pendidikan politik yang disumbangkan oleh oposisi ini adalah rakyat dapat mengetahui berbagai kepentingannya yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah, dan publik akan lebih pintar dan rasional dalam menilai kinerja pemerintahan SBY-JK, begitu pula dalam menilai efektifitas oposisi PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingannya. Oposisi juga memberikan pendidikan politik untuk para eksekutif (penguasa), bahwa dalam demokrasi perbedaan adalah keniscayaan, kritik adalah kekuatan dan penyamarataan adalah musuh utama demokrasi serta memperketat *Accountability* para penguasa sehingga dalam menetapkan kebijakan publik harus lebih hati-hati. Secara umum, pendidikan politik dari oposisi ini bermanfaat untuk meningkatkan kapabilitas dan responsibilitas politik bagi rakyat, kader PDI Perjuangan dan seluruh fraksi di DPR dalam meningkatkan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mampu mengontrol, mengawasi, dan mengkritisi secara efektif dan supportif berbagai kebijakan publik agar kepentingan rakyat terpenuhi.

3. Tidak efektifnya kabinet bayangan yang dibentuk DPP PDI Perjuangan, memberatkan anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam berposisi di DPR, karena hanya mengandalkan kemampuan individu dan fraksi tanpa adanya masukan dari kabinet bayangan, hal ini membuat oposisi PDI Perjuangan kurang menunjukkan kecerdasannya dalam memainkan perannya sebagai oposan.
4. Kecerdasan oposisi PDI Perjuangan kurang terlihat pada saat memberikan alternatif kebijakan pada pemerintah. Sikap kritis Fraksi oposisi PDI Perjuangan dalam memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tidak seluruhnya disertai alternatif kebijakan yang lebih baik dari kebijakan pemerintah untuk ditawarkan sebagai kebijakan tandingan. Kebijakan alternatif yang diusulkan fraksi Oposisi kurang konkret, dan tidak dijelaskan secara mendetail. Dapat dilihat ketika PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM, impor beras, dan BLT, dalam penolakannya fraksi oposisi tidak memberikan alternatif yang seharusnya dilakukan oleh oposan, yaitu diantaranya memberikan gambaran pada pemerintah apa yang seharusnya dilakukan, dengan cara apa, dan bagaimana aplikasinya. Ketiga hal tersebut tidak dijadikan dasar penolakan terhadap kebijakan yang ditawarkan pemerintah.
5. Kecerdasan oposisi PDI Perjuangan juga tidak ditunjukkan dalam hal strategi menggalang aliansi kekuatan oposisi dan strategi komunikasi publik. Hal ini dapat dilihat ketika Fraksi PDI Perjuangan memberikan alternatif kebijakan mengenai penentuan kelulusan dalam Ujian Nasional (UN), dengan

mengkombinasikan keempat syarat kelulusan pada pasal 72 PP No. 19 Tahun 2005 lalu dibagi empat. Meskipun hal tersebut lebih baik, namun fraksi oposisi kalah suara hal ini bahwa Oposisi PDI Perjuangan tidak memiliki strategi khusus dalam menggalang aliansi kekuatan oposisi baik lintas fraksi maupun lintas parpol, yang sebenarnya sangat penting untuk memperkuat suara dalam legislatif dalam mempengaruhi kebijakan publik yang akan dibuat oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan usulan-usulan oposisi tidak maksimal terakomodir oleh pemerintah karena suara dukungan fraksi lain kecil, salah satunya terbukti dari sikap pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM dan tetap melakukan impor beras. Begitu pula dengan strategi komunikasi publik, hal ini membuat keberadaan oposisi PDI Perjuangan menjadi topik kedua dimata publik, dan eksistensi oposisi diluar gedung DPR diragukan oleh masyarakat. Selain itu, dalam hal ini fraksi oposisi banyak dirugikan karena media massa tidak memihak ataupun *memblow up* semua yang dilakukan PDI Perjuangan.

B. SARAN

1. Upaya *check and balances* yang dilakukan Oposisi PDI Perjuangan akan optimal jika dalam pelaksanaannya disertai sikap kritis, bukan reaktif. Sikap politik oposisi PDI Perjuangan sudah semestinya terus melahirkan sikap kritis dan korektif yang objektif antara partai oposisi dan penguasa dalam bingkai aturan main dan cita-cita bersama untuk membangun bangsa, sehingga apapun kritik dan koreksi partai tidak diwarnai "sandiwar politik" yang hanya

berfungsi ibarat *lips service* partai di mata rakyatnya. Jadi oposisi PDI Perjuangan mampu membuktikan bahwa oposisinya tidak “*waton suloyo*” atau sekadar tampil beda, yakni selalu menyalahkan apa yang dilakukan pemerintah. Sedangkan dalam menjabatani kepentingan masyarakat dan penguasa, seharusnya fraksi oposisi lebih banyak berkomunikasi dengan publik, tidak terbatas pada masa reses saja.

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan oposisi yang diambil oleh PDI Perjuangan merupakan bagian dari pendidikan politik bagi rakyat dan seluruh kader partai, bahkan seluruh fraksi di DPR maka untuk mengoptimalkannya, diperlukan pendidikan politik yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik ditingkat kader ataupun untuk masyarakat secara umum.
3. PDI Perjuangan harus mengefektifkan kinerja kabinet bayangan. Setiap anggota kabinet bayangan itu harus mampu mendesain kebijakan untuk ditawarkan pada pemerintah. Dengan begitu, persepsi pemerintah dan publik terhadap oposisi PDI Perjuangan akan menjadi positif. Pada sisi lain, pemerintah pun perlu lebih membuka diri. Jadi para menteri yang ada dalam portofolio kabinet Indonesia Bersatu sekarang ini, harus ada yang terus memantau. PDI Perjuangan harus memiliki orang-orang yang berperan sebagai menteri yang membayangi menteri-menteri yang ada di kabinet SBY. Kabinet bayangan PDI Perjuangan dapat diisi tidak hanya oleh internal PDI Perjuangan, tetapi juga pengamat dan aktivis yang bersedia bermitra dengan PDI Perjuangan. Secara rutin dan insidental kabinet bayangan PDI Perjuangan

merilis hasil pemantauannya sekaligus mengusulkan alternatif kebijakan terhadap pos-pos kementerian tertentu.

4. Fraksi PDI Perjuangan dalam oposisinya, harus menunjukkan kesungguhan dan kapabilitasnya dalam memberikan alternatif kebijakan kepada pemerintah. Sehingga alternatif kebijakan tersebut dapat dijadikan bahan perbandingan, bahkan pilihan yang lebih baik dan diimplementasikan oleh pemerintah. Dengan demikian publik akan menilai oposisi atau pemerintah yang lebih memihak kepentingan masyarakat.
5. Fraksi oposisi PDI Perjuangan harus memperbaiki strategi komunikasi publik, serta memperkokoh kekuatan aliansi baik didalam fraksi maupun antar partai, agar oposisi PDI Perjuangan bisa berdampak lebih nyata terhadap konstelasi politik dan pembuatan kebijakan, maka mereka harus berkoordinasi dengan fraksi dan partai lain untuk memperkuat suara dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.